

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan tesis ini merupakan tugas akhir dan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam program pelatihan manajemen STIE Mahardhika Surabaya, serta upaya untuk memperoleh gelar sarjana. Saya yakin lulusannya akan mampu bersaing di dunia kerja. Untuk mengaplikasikan ilmu secara langsung, pengetahuan teoritis yang diperoleh di bangku kuliah harus koheren. Penyusunan skripsi ini merupakan tahapan terakhir dari perkuliahan mahasiswa hingga kelulusan. Mahasiswa harus mampu menulis esai dalam bentuk esai yang disebut disertasi, dengan menggunakan ilmu yang diperoleh selama kurang lebih delapan semester semester.

Artikel ini berfokus pada pembahasan proses pertanggungjawaban Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Jawa Bali Nusa Tenggara terkait penggunaan dana publik. Badan tersebut adalah Direktorat Badan Informasi Keuangan di Siba. Penulis adalah pegawai kantor BPPHLHK Jawa Bali Nusa Tenggara yang merupakan mahasiswa yang berminat berkontribusi untuk pembangunan gedung perkantoran. Upaya pelaksanaan anggaran umum negara dihitung menurut metodologi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Langkah nyata untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik adalah penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan akuntansi pemerintah dan standar lainnya. Dimana laporan pertanggungjawaban APBN harus disajikan dalam bentuk laporan keuangan

yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, neraca, laporan pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan. Informasi keuangan BPPHLHK di Jawa Bali Nusa Tenggara adalah data keuangan yang dikelola oleh BPPHLHK di Jawa Bali Nusa Tenggara. Laporan keuangan ini disusun melalui Sistem Akuntansi Instansi, yaitu suatu sistem aplikasi yang mencakup prosedur manual dan terkomputerisasi untuk komunikasi, pengumpulan, pencatatan, dan pemantapan informasi yang berkaitan dengan status keuangan dan operasional departemen/instansi pemerintah. Dalam praktiknya, proses pelaporan keuangan daerah dan pencatatan/pelaporan BMN semakin memburuk dan kurang mendapat perhatian dari manajemen Sattaker. Penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk sebatas kinerja administrasi untuk memfasilitasi akuntabilitas keuangan publik dan tidak secara khusus digunakan untuk pengambilan keputusan strategis..

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan topik **Proses Pertanggungjawaban Keuangan Negara pada Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara di Sidoarjo.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan tugas akhir ini adalah bahwa proses penyusunan laporan keuangan kantor BPPHLHK di Jawa Bali Nusa Tenggara didasarkan pada Tanggung Jawab Keuangan Publik/Pengelolaan Anggaran Publik..

### **1.3 Tujuan**

Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk memenuhi kebutuhan memberikan kuliah di STIE Mahardhika Surabaya, serta menyusun laporan keuangan yang menjadi dasar penggunaan Laporan Keuangan Publik (APBN). Kantor BPPHLHK di Nusa Tenggara, Jawa Bali.

### **1.4 Manfaat**

Tesis ini dapat digunakan untuk mengetahui pelaksanaan proses pelaporan dalam laporan keuangan dan dasar penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (BRB). Ini bertujuan untuk memperkuat arah strategis para pemimpin.